

**OPERASI PEMBERANTASAN KEJAHATAN (OPK) DAN PREMANISME DI
YOGYAKARTA (1983-1985)**

E-JURNAL



Oleh :

**Angga Nur Pradana
12406241048**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN

PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2017

OPERASI PEMBERANTASAN KEJAHATAN (OPK) DAN PREMANISME DI YOGYAKARTA (1983-1985)

Angga Nur Pradana dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd

Email :
Anggan
urprad
ana@y
ahoo.co
m



A
B
S
T
R
A
K

Tahun 1983 muncul premanisme di Yogyakarta yang kemudian dilakukan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) oleh Garnisun Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi politik, sosial dan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1970-1982; (2) latar belakang premanisme di Yogyakarta pada tahun 1983-1985 saat terjadi OPK; (3) OPK dan Dampaknya di Yogyakarta pada tahun 1983-1985.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, yaitu (1) pemilihan topik yang didasari oleh kedekatan emosional dan intelektual; (2) sumber primer melakukan wawancara dengan mantan gali yang menjadi target OPK; (3) kritik sumber dilakukan dengan kritik ekstern dan kritik intern; (4) interpretasi melakukan analisis dan sintesis yang bertujuan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan; (5) historiografi atau penulisan sejarah menekankan pada aspek kronologis.

Hasil penelitian; (1) tahun 1973 pemerintah Orde Baru membuat kebijakan fusi partai politik bertujuan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Pembangunan Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha mengendalikan tingkat inflasi. Hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mensejahterakan kondisi sosial seluruh rakyat Indonesia; (2) premanisme di Yogyakarta pada tahun 1983-1985 dilatar belakangi banyak faktor, utamanya adalah masalah sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan pengambilan sikap Kodim Yogyakarta melakukan operasi dengan nama OPK.; (3) OPK di Yogyakarta bertujuan memberantas preman yang meresahkan masyarakat. OPK berdampak positif bagi masyarakat Yogyakarta karena premanisme menurun drastis dan berdampak negatif bagi para preman karena sulit mendapatkan pekerjaan.

Kata kunci : *OPK, Premanisme, Yogyakarta, 1983-1985.*

THE CRIME COMBAT OPERATION (CCO) AND THE THUGGERY IN YOGYAKARTA (1983-1985)

Angga Nur Pradana and Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd

Email: Angganurpradana@yahoo.com



**A
B
S
T
R
A
C
T**

In 1983, there was thuggery in Yogyakarta so that the Crime Combat Operation (CCO) was conducted by a garrison in Yogyakarta. This study aimed to investigate: (1) political, social and economic conditions during the New Order era in 1970-1982; (2) the background of the thuggery in Yogyakarta in 1983-1985 during the CCO; and (3) the CCO and its impacts in Yogyakarta in 1983-1985.

The study used Kuntowijoyo's historical research method, with the stages of: (1) topic selection based on emotional and intellectual closeness; (2) primary source collection through interviews with ex-members of a criminal gang targeted by the CCO; (3) source criticism conducted through external and internal criticism; (4) interpretation done by analysis and synthesis aiming to interpret the historical facts found; and (5) historiography or history writing done by emphasizing the chronological aspect.

The results of this study were as follows. (1) In 1973 the New Order government made a policy on the fusion of political parties with the aim of creating strong political stability. The economic development of the New Order was oriented towards the recovery of the national economy, especially in an effort to control the inflation rate. The results of economic growth were expected to realize social welfare for all Indonesian people. 2) The thuggery in Yogyakarta in 1983-1985 was motivated by several factors, mainly social and economic problems. The rise of thuggery actions in Yogyakarta made the military district

command of Yogyakarta take the initiative to carry out an operation called the CCO. (3) The CCO in Yogyakarta was intended to combat thugs that disturbed the public. The CCO brought positive benefits to the people of Yogyakarta because the crime rate dropped dramatically. The negative impact of the CCO was felt by thugs, as it was difficult to get a job.

Keywords: *CCO, Thuggery, Yogyakarta, 1983-1985*

I. PENDAHULUAN

Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia mengalami kekacauan. Berbagai gelombang protes mahasiswa mulai muncul sebagai respon ketidakpuasan terhadap situasi negara yang semakin memburuk. Kondisi tersebut mendorong Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966.¹ Supersemar menjadi tiket bagi Soeharto untuk naik ke puncak kekuasaan melengserkan Soekarno.



Orde Baru sejatinya memberikan harapan-harapan yang baru pada masyarakat terutama pada perubahan politik yang demokratis. Hal ini dibuktikan dengan menyelenggarakan pemilu enam kali dengan periode 5 tahun sekali. Dilihat dari kualitas penyelenggaraan pemilu, dapat dikatakan masih jauh dari semangat demokrasi² Hal ini dibuktikan dengan pelantikannya secara berturut-turut ini tidak lepas dari kebijakan represif yang menekan rakyat agar memilih Golkar. Fakta membuktikan bahwa setiap pemilu, lebih dari 50% rakyat memilih Golkar.³

Premanisme diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau masyarakat lain dengan cara kekerasan, intimidasi. Premanisme cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat.⁴ Wilayah operasi bagi preman adalah tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, jalanan dan diskotik. Premanisme dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial dan ekonomi. Susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan masyarakat mencari nafkah dengan segala cara. Salah satu contohnya dengan mencopet, memalak dan mencuri yang meresahkan masyarakat.⁵

Tindak kriminal yang semakin meningkat menjadi alasan Garnisun Yogyakarta untuk melakukan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK).

1 Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994) hlm. 139.

2 Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm.33.

3 Asvi Warman Adam, dkk, *Soeharto Sehat*, (Yogyakarta: Galangpress, 2006) hlm 70-71.

4 Tim Perpustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Aksara, 1987) hlm. 476.

5 Budiawan, *Kritik terhadap Militerisme dalam Sastra: Kasus Tiga Cerita Pendek Seno Gumira Ajidarma tentang "Penembak(an) Misterius"*, dalam Seno Gumira Ajidarma. *Penembak Misterius*. (Yogyakarta: Galangpress, 2007) hlm. 185-186.

Terjadinya OPK menjadikan angka kejahatan yang terjadi di Yogyakarta turun drastis. Menurunnya angka kriminalitas di Yogyakarta ini menjadikan kondisi Yogyakarta lebih kondusif.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.⁶ Kajian pustaka terkait dengan literatur yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitiannya. Kajian pustaka digunakan untuk mensinkronkan antara tulisan yang dibuat penulis dan sumber itu sendiri. Kajian pustaka sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Fungsinya untuk memperoleh data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan kajian.



Pembahasan mengenai kondisi politik, ekonomi dan sosial Orde Baru tahun 1970-1982. Penulis menggunakan buku karya Richard Robinson yang berjudul *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* terbitan Komunitas Bambu. Buku tersebut bercerita tentang asal-muasal bangkitnya Orde Baru sebagai sebuah Kapitalisme negara beserta dimensi sosial-politik yang melatarbelakanginya.

Latar belakang premanisme di Yogyakarta pada tahun 1983-1985, penulis menggunakan buku karya Asvi Warman Adam yang berjudul

Soeharto Sehat. Buku tersebut diterbitkan oleh Galangpress pada tahun 2006. Buku ini membahas tentang usaha untuk menyukseskan Golkar dalam Pemilu tahun 1982 pemerintah tak segan-segan menggunakan preman dalam kampanye. Preman merasa berhak mendapatkan imbalan pasca membantu Golkar dalam pemilu, sehingga preman semakin berani memeras masyarakat.

B. Metode Penelitian

Menurut Kuntowijoyo, penelitian mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (Kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (historiografi).⁷

AI. PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial pada Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1970-1982.

1. Kondisi Politik Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1970-1982

Pilar utama pemerintahan Orde Baru dalam mendominasi perpolitikan nasional adalah Golkar dan keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam bidang politik. Keterlibatan ABRI dalam politik tidak terlepas dari hasil Seminar

6 Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*, (Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY, 2013), hlm.3.

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

Pertama Angkatan Darat pada bulan April 1965 yang menghasilkan doktrin “Tri Ubaya Cakti”. Doktrin ini menegaskan posisi ABRI sebagai kekuatan militer serta sosial-politik untuk mewujudkan cita-cita nasional.⁸ Doktrin tersebut kelak dipegang teguh oleh seluruh anggota institusi TNI.

Angkatan Darat juga mengeluarkan sebuah konsep “Dwi fungsi” yang kemudian diadopsi oleh institusi ABRI keseluruhan.⁹ Konsep Dwifungsi ABRI ini baru benar-benar dilaksanakan ketika Soeharto telah menjabat sebagai presiden. Pelaksanaannya, ABRI dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun Orde Baru untuk menuniang dan menjalankan kekuasaannya.¹⁰



Kedua pilar pemerintahan Orde Baru, yaitu Golkar dan ABRI seringkali bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan rezim penguasa. Sebagai contoh, ABRI terlibat aktif dalam rangka memenangkan Golkar dalam pemilu 1971. Mulai dari adaptasi sistem komando dalam jajaran Golkar hingga bantuan nyata di lapangan. Contohnya adalah penyediaan truk pengangkut massa dan operasi Babinsa untuk membantu para Lurah menggerakkan rakyat memilih Golkar. Mobilisasi jaringan birokrasi melalui Permendagri no. 12/1969. Dukungan dari ABRI dan birokrasi ini terus menopang keberhasilan Golkar dalam pemilu-pemilu berikutnya. Hanya saja

cara dukungan itu semakin tidak langsung dan intensitasnya juga tidak setinggi menjelang pemilu 1971.¹¹

2. **Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru Tahun 1970-1982**

Pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Tingkat inflasi ini yang menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.¹²

Tujuan jangka pendek pemerintahan Soeharto adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri dan mendorong masuknya investasi asing. Pemerintahan Soeharto membongkar isolasi ekonomi yang tadinya

⁸ Soebijono, dkk. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 1997), hlm. 33.

¹⁰ Eddy Budiarto, *Menentukan Tiran, Aksi Mahasiswa 77/78*. (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 2-3.

¹¹ *Ibid.*, hlm 194.

¹² Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*. (Jakarta : CSIS, 1981), hlm. 48.

tertutup menjadi terbuka. Pembangunan ekonomi pemerintahan Soeharto jika dilihat dari segi fisiknya, telah berhasil mengubah Indonesia menjadi lebih modern. Industrialisasi dan berdirinya gedung-gedung modern di kota-kota besar merupakan dampak dari pembangunan ekonomi Orde Baru.¹³ Soeharto sukses mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia.

3. **Kondisi Sosial Indonesia pada Masa Orde Baru tahun 1970-1982** Sesuai dengan konsep trilogi pembangunan, pemerintah Orde Baru pada dasarnya menginginkan adanya pemerataan terhadap hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Hasil-hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan inilah yang kemudian diwujudkan dalam berbagai kebijakan dari pemerintah seperti lewat program Pelita.



Pemerintah Orde Baru juga sukses untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Tingginya pertumbuhan penduduk ini terutama disebabkan masih tetap tingginya tingkat kelahiran dan menurunnya tingkat kematian. Keluarga berencana merupakan bagian utama dari pada usaha jangka panjang untuk menurunkan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Berhasilnya keluarga berencana dibuktikan

dengan angka kelahiran setiap tahunnya turun dan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan. Tahun 1970-1980 pertumbuhan penduduk sebanyak 2,32% dan turun menjadi 1,97% pada tahun 1980-1990.¹⁴

Terlepas dari segala pencapaiannya dalam bidang kesehatan, pemerintah Orde Baru bisa dibilang belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat. Beberapa persoalan tersebut menyangkut keterbatasan kesempatan kerja maupun persoalan regional.¹⁵ Persoalan-persoalan inilah yang kemudian mengakibatkan timbulnya masalah sosial seperti premanisme.

B. Latar Belakang Premanisme di Yogyakarta pada Tahun 1982-1985

1. Kondisi Umum Yogyakarta pada Masa Orde Baru

a. Kondisi Geografis Yogyakarta pada Masa Orde Baru Daerah

Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 27 provinsi di Indonesia. Secara geografis provinsi Yogyakarta terletak di tengah pulau Jawa dengan 7⁰30' sampai 8⁰15' lintang

13 *Ibid.*,

14 Departemen Penerangan Republik Indonesia, (1981), *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto*, tersedia pada www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9284/1763/ hlm. 983. Diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 07.45 wib.

15 H.W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 1994), hlm. 109-110.

selatan dan $110^{\circ}00'$ sampai $110^{\circ}52'$ bujur timur. Yogyakarta menjadi provinsi terkecil kedua setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas $3.112,87 \text{ km}^2$.¹⁶ Yogyakarta memiliki 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten, Yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul.

Menurut hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk Yogyakarta adalah sekitar 2,8 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Yogyakarta cukup tinggi yaitu 868 per km^2 . Kepadatan yang cukup tinggi di Yogyakarta ini menjadi masalah ketika Kotamadya Yogyakarta dengan luas $31,75 \text{ km}^2$ dihuni oleh 398.192 jiwa dengan kepadatan penduduk 12.252,06 per km^2 . Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh besarnya arus urbanisasi ke Kotamadya Yogyakarta yang sebagian besar untuk kepentingan belajar dan sebagian lainnya untuk bekerja.¹⁷



b. Kondisi Politik dan Ekonomi Yogyakarta pada Masa Orde Baru

Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Orde Baru dipimpin oleh gubernur yang menjabat sebagai raja, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan Hamengku Buwono

IX juga menjadi tokoh nasional pada masa pemerintahan Orde Baru karena pada tahun 1966 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Empat bulan kemudian, ia menjadi Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Soeharto pada tahun 1973 sampai 1978.¹⁸ Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga dikenal sebagai tiga serangkai Orde Baru bersama dengan Soeharto dan Adam Malik.¹⁹

Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada masa Orde Baru membentuk Yayasan Kredit Tani Indonesia (Yakti) untuk membantu para petani. Adanya Yakti ini menjadikan perkembangan ekonomi di Yogyakarta mengalami kemajuan pada tahun 1980. Tingginya angka kemajuan ini disebabkan

16 Tim, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 1982*, (Yogyakarta: Kantor Statistik Yogyakarta, 1982), hlm. 1.

17 Tim, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1985*, (Yogyakarta: Kantor Statistik Yogyakarta, 1985), hlm. 1-2.

18 Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), hlm. 79-80.

19 A. Dahana, dkk, *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengku Buwono IX: Sebuah Presentasi Majalah Tempo*. (Jakarta: Grafiti Press, 1988), hlm. 54.

Sultan menjalankan pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan ini berdasarkan efisiensi dari potensi daerah yang sudah ada.²⁰

c. **Kondisi Sosial dan Budaya Yogyakarta pada Masa Orde Baru**

Yogyakarta sebagai kota pendidikan menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi dinamis. Banyaknya pendatang yang akan belajar di Yogyakarta sangat berpengaruh pada perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial di Yogyakarta membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat seperti usaha kontrakan dan warung makan.

Dampak negatifnya adalah munculnya tindak kriminalitas di Yogyakarta karena sebagian orang memanfaatkan keadaan para mahasiswa untuk dijadikan sasaran kejahatan. Seperti kasus penjambretan mahasiswi Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) Yogyakarta yang dibacok hingga tewas pada tahun 1983. Kejadian ini menjadi salah satu penyebab adanya

Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Yogyakarta.²¹

Sebagai orang Jawa, masyarakat Yogyakarta sikap hidup masyarakat dipengaruhi oleh nilai budaya Jawa. Nilai budaya inilah yang dijadikan pedoman tingkah laku dan atau perbuatan manusia sebagai masyarakat. Budaya Jawa memang sangat melekat pada masyarakat Yogyakarta, seperti adat istiadat, norma dan sopan santun.²²

Kondisi budaya Yogyakarta pada masa Orde Baru tidak mengalami perubahan daripada masa sebelumnya. Kondisi ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat Yogyakarta terpusat pada keraton Yogyakarta. Sistem sosial budaya Yogyakarta



banyak dipengaruhi oleh norma-norma lama yang berorientasi pada sistem feodalisme.²³ Sehingga masyarakat masih

20 Laksmi Kusuma Wardani, (2012). “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, No. 1 Volume 25, hlm. 6. Tersedia pada <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/06%20laksmi%20Revisi%20FIX%20PENGARUH%20PANDANGAN%20SOSIO-KULTURAL%20SULTAN.pdf> pada tanggal 17 Agustus 2017, pukul 17.04 WIB.

21 R-13, R-11, (1983). Operasi Berlangsung Sepanjang Tahun, untuk Cegah Adanya Regenerasi Gali, *Bernas*, hlm. 1.

22 Tim, *Sistem gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 18-19.

23 *Ibid.*, hlm. 19.

menganggap bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Keraton adalah pusat kebudayaan Yogyakarta.

2. Latar Belakang Munculnya Premanisme Di Yogyakarta

Usaha untuk menyukseskan Golkar dalam Pemilu tahun 1982 pemerintah tak segan-segan menggunakan preman dalam kampanye. Para preman disini digunakan pemerintah untuk memaksa masyarakat untuk memilih Golkar. Hal ini bertujuan untuk memberi kesan bahwa Golkar mendapat dukungan dari masyarakat luas. Berkat kampanye yang didukung preman tersebut, akhirnya partai Golkar menang mutlak pada kampanye tersebut.²⁴



Preman merasa berhak mendapatkan imbalan pasca membantu Golkar dalam pemilu, sehingga preman semakin berani memeras masyarakat. Masyarakat semakin merasa dirugikan dengan adanya tindakan premanisme. Masyarakat yang sudah merasa kesal dengan tindakan premanisme ini mulai melaporkan kepada yang berwajib.

Komandan Kodim 0734, Letnan Kolonel Muhammad Hasbi, selaku Komandan Operasi Gabungan terhadap para pelaku kejahatan, termasuk di dalamnya gali (gabungan anak liar). Letkol Hasbi menegaskan faktor penyebab untuk kalangan ini berbuat nekat selain masalah sosial, ekonomi, dan perut. Permasalahan mendasar ada pada masalah mental, yang kemudian terangsang oleh keinginan

hidup mewah. Teror mental terhadap mangsanya membuat kalangan gali berada diatas angin yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat luas.²⁵ Premanisme dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial dan ekonomi. Susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan masyarakat mencari nafkah dengan segala cara. Salah satu contohnya dengan mencopet, memalak dan mencuri yang meresahkan masyarakat.

C. Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) dan Dampaknya di Yogyakarta pada tahun 1983-1985

1. Latar Belakang Terjadinya Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Yogyakarta Tahun 1983-1985

Pemilihan umum yang terkesan dikelola oleh pemerintahan Orde Baru ini “menyewa” tenaga dari kelompok-kelompok pemuda yang tidak terorganisir dan pemuda paramiliter, yang kebanyakan terdiri atas unsur-unsur bekas kriminal untuk ikut dalam demonstrasi-demonstrasi selama kampanye pemilihan umum. Aparat-aparat setengah resmi tersebut benar-benar telah menekan penduduk pedesaan untuk memberikan suara kepada Golkar. Pasca pemilihan umum 1982, kelompok-kelompok kriminal itu menuntut imbalan

24 Asvi Warman Adam, dkk, *Soeharto Sehat*. (Yogyakarta: Galangpress, 2006)
hlm

33.

²⁵ R-13, R-11, (1983). Operasi Berlangsung Sepanjang Tahun, untuk Cegah Adanya Regenerasi Gali, *Bernas*, hlm. 1.

“hadiah” mereka kepada pemerintah dan tingkat kejahatan demikian meningkat hingga derajat ketakutan di antara masyarakat menjadi tidak tertahankan.²⁶

2. Premanisme di Yogyakarta Saat Terjadi Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) Tahun 1983-1985

Salah satu gali yang disegani di Yogyakarta adalah Wahyu. Wahyu tidak hanya disegani oleh masyarakat, namun juga disegani para gali di Yogyakarta. Oleh sebab itu sasaran tembak pertama yang diincar oleh aparat adalah Wahyu, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendata para gali yang merupakan teman Wahyu.

Ditembaknya Wahyu merupakan awal dari OPK di Yogyakarta, setelah itu ditemukan 2 mayat yang merupakan teman dari Wahyu. Kenthus menjelaskan bahwa “... Teman saya Tetuko dan Kojur yang datang melayat, lalu di depan peti Wahyu bilang mau balas dendam kepada siapa yang membunuh Wahyu. Tetuko dan Kojur malamnya sudah hilang dan tau-tau jenazahnya sudah di pinggir jalan.”²⁷

Letkol Hasbi juga mengingatkan para gali agar segera menyerahkan diri dalam waktu singkat. Gali yang tidak mau melaporkan diri ke pihak garnisun, maka aparat keamanan yang akan menjemput. Ia menyatakan bahwa pihak Kodim sudah memiliki nama-nama gali yang telah disusun dalam daftar hitam.²⁸

Mayat korban penembakan dibuang ditempat yang ramai, seperti stasiun, pasar dan pinggir jalan raya. Hal itu untuk menunjukkan bahwa OPK ini dimaksudkan untuk berbicara kepada rakyat biasa. Membawa pesan agar masyarakat dapat melihat bagaimana upaya penguasa bertindak terhadap penjahat.²⁹

3. Premanisme di Yogyakarta Setelah Terjadi Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) Tahun 1983-1985.

Pangkowlihan II Letnan Jendral Yogi Suardi Memed menyatakan OPK di Yogyakarta berjalan cukup baik. Pasca diadakannya OPK pada umumnya masyarakat merasa aman. Jumlah gali yang ditangkap



26 Nico G. Schulte Nordholt, *Kekerasan dan Anarki Negara Indonesia Modern*, dalam Frans Husken dan Huub de Jonge (Ed.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 88.

27 Wawancara dengan Kenthus, tanggal 5 Mei 2017, di rumah Kenthus.

28 Tim, (2011), *Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985*, hlm.10. Diunduh dari <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=44&id=2639&cid=10003&lang=en> pada hari Senin 24 Juli 2017 pukul 15.01 WIB.

29 Eldar Braten, *Melawan Komunitas, Melampaui Kemanusiaan: memahami "Kekerasan" di Jawa*, dalam Frans Husken dan Huub de Jonge (Ed.), *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.

21.

dan melaporkan diri di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya mencapai 1000 orang, sedangkan gali yang ditembak sebanyak 60 orang.³⁰

Para gali yang menyerahkan diri telah memperoleh pengarahan agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Para gali yang menyerahkan diri sebagian besar dilepaskan dan diberi kartu tanda lapor. Banyak gali yang menginginkan untuk transmigrasi, namun pihak berwajib tidak begitu saja mengirim mereka untuk transmigrasi, dilihat dulu kemampuan mereka bertani dan sudah benar-benar bertaubat.³¹



Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) Oka Mahendra berpendapat, pengembangan operasi penanggulangan kejahatan tersebut akan lebih efektif jika melibatkan berbagai pihak. Instansi pemerintahan seperti Dinas Sosial, Kanwil Depnaker dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama, karena tahap pembinaan ini tidak mudah. Ia juga mengingatkan Pagkowlihan agar operasi tersebut dilaksanakan tanpa menyimpang dari ketentuan hukum.³² Operasi yang dilakukan tersebut jika menyimpang hukum, sama saja dengan para penjahat yang melakukan kejahatan.

4. Dampak Terjadinya Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Yogyakarta Tahun 1983-1985.

Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) yang dilakukan oleh Garnisun Yogyakarta banyak mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat. Adanya OPK menjadikan para preman di Yogyakarta berfikir ulang untuk melakukan kejahatan. Menurut staf Kepolisian di Koresta 961 dan komandan Kosek di Yogyakarta, kriminalitas di daerahnya menurun drastis.³³

Kriminalitas di Yogyakarta menurun drastis setelah pelaksanaan OPK yang dilaksanakan oleh Garnisun Yogyakarta. Angka perampokan, penodongan dan perampasan menunjukkan nihil, sedangkan jambret hanya terjadi sekali dan pencurian kendaraan bermotor hanya dua kali. Angka kriminalitas di Yogyakarta sebelum adanya OPK memang memprihatinkan, perampokan rata-rata terjadi 40 kali perbulannya.³⁴

OPK membawa dampak yang negatif bagi para gali. Dampak pertama adalah masalah ekonomi bagi para gali, karena susah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dampak lain adalah dampak psikologi bagi para gali, para gali menjadi takut untuk menyampaikan

30 Tim, *Op. Cit.*, hlm 20.

31 Sgpr, (1983). Operasi Pemberantasan Kejahatan Melegakan, *Kedaulatan Rakyat*, No. 178 Tahun XXXVIII, hlm 1 dan 12.

32 *Ibid.*,

33 Ias, dkk, (1983). Banyak Sambutan Positif Terhadap Operasi Tumpas Kejahatan, *Kedaulatan Rakyat*, No. 157 Tahun XXXVII, hlm. 1.

34 *Ibid.*,

apa yang telah dialami. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan dua dampak tersebut, dengan melakukan penyuluhan dalam bidang ekonomi dan psikologi. Hal ini diharapkan agar gali tidak lagi terjerumus dalam kegiatan kriminal.

Staf ahli Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, Dr. Masri Singarimbun berpendapat, setelah dilakukan OPK harus dipikirkan adalah penyaluran mereka dalam berbagai bidang. Menurutnya para gali merupakan warga negara yang tidak punya pekerjaan dan harus disalurkan sesuai bidangnya. Sebaiknya mereka tidak dipekerjakan di daerah asal mereka, karena akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami adalah masih takutnya perusahaan untuk merekrut mereka. Hal ini perlu diperhatikan agar mereka dapat kembali bekerja dan pemilik perusahaan tidak takut untuk merekrut mereka. Usaha lain yang dapat ditempuh adalah memperkerjakan mereka di lingkungan ABRI, misalnya dibengkel milik ABRI.³⁵



III
·
K
E
S
I
M
P
U
L
A
N

Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Orde Baru dipimpin oleh gubernur yang menjabat sebagai raja, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga menjadi tokoh nasional pada masa pemerintahan Orde Baru karena pernah menjabat sebagai Menteri dan Wakil Presiden. Sri Sultan Hamengku Buwono IX berinisiatif membentuk

Yayasan Kredit Tani Indonesia (Yakti) untuk membantu para petani. Adanya Yakti ini menjadikan perkembangan ekonomi di Yogyakarta mengalami kemajuan pada tahun 1980. Tingginya angka kemajuan ini disebabkan Sultan menjalankan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan terjadinya aksi premanisme. Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang bekerja dengan mengandalakan kekuatan fisik untuk bertindak kriminal seperti memalak, memeras dan mencopet. Preman hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Premanisme dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial dan ekonomi. Susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan masyarakat mencari nafkah dengan segala cara. Salah satu contohnya dengan mencopet, memalak dan mencuri yang meresahkan masyarakat.

OPK yang dilaksanakan oleh Garnisun Yogyakarta dianggap berhasil dan dengan cepat dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Banyak preman dan residivis ditemukan tewas dengan luka tembak. Jumlah korban jiwa akibat penembakan misterius ini diungkapkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencapai angka lebih dari 5000 jiwa. Jumlah gali yang ditangkap dan melaporkan diri di wilayah Yogyakarta dan

sekitarnya mencapai 1000 orang, sedangkan gali yang ditembak sebanyak 60 orang.

Pasca adanya OPK keadaan di Yogyakarta menjadi lebih aman. Adanya OPK membawa dampak yang positif bagi masyarakat Yogyakarta. Kondisi Yogyakarta yang lebih aman menjadikan masyarakat lebih bebas untuk melakukan aktifitas dengan nyaman. Sebelum adanya OPK kondisi kriminalitas di Yogyakarta sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan terjadi hampir setiap hari dan secara terang-terangan.

Kriminalitas di Yogyakarta menurun drastis setelah pelaksanaan OPK yang dilaksanakan oleh Garnisun Yogyakarta. Angka perampokan, penodongan dan perampasan menunjukan nihil, sedangkan jambret hanya terjadi sekali dan pencurian kendaraan bermotor hanya dua kali. Angka kriminalitas di Yogyakarta sebelum adanya OPK memang memprihatinkan, perampokan rata-rata terjadi 40 kali perbulannya.



Adanya OPK juga membawa dampak yang negatif bagi para gali. Dampak pertama adalah masalah ekonomi bagi para gali, karena susah untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan dua dampak tersebut, dengan melakukan penyuluhan dalam bidang ekonomi. Hal ini diharapkan agar gali tidak lagi terjerumus dalam kegiatan kriminal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dahana, dkk, (1988) *Sri Sultan: Hari-Hari Hamengku Buwono IX: Sebuah Presentasi Majalah Tempo*. Jakarta: Grafiti Press.
- Afan Gaffar, 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali Moertopo. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : CSIS.
- Asvi Warman Adam, dkk, 2006, *Soeharto Sehat*, Yogyakarta: Galangpress.
- Eddy Budiarmo. 2000. *Menentukan Tiran, Aksi Mahasiswa 77/78*. Jakarta : Grasindo.
- H.W. Arndt.1994. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, (2010). *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Jurusan Pendidikan Sejarah, 2013, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- M.C. Ricklefs. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Retnowati Abdulgani. 2007. *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soebijono, dkk. 1997. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

- Tim, (1982) *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 1982*, Yogyakarta: Kantor Statistik Yogyakarta.
- Tim, (1982). *Sistem gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim, (1985) *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1985*, Yogyakarta: Kantor Statistik Yogyakarta.

Surat Kabar

- Ias, Ofa, (1983). Bekas 'Gali' Supaya Segera Disalurkan, *Kedaulatan Rakyat*, No. 191 Tahun XXXVIII.



Penguji Utama

Dr. Aman, M.Pd.
19741015 200312 1 001

Yogyakarta, 11 Oktober 2017
Menyetujui
Dosen Pembimbing

Rhoma Dwi Aria Y, M.Pd.
19820704 201012 2 004

- R-13, R-11, (1983). Operasi Berlangsung Sepanjang Tahun, untuk Cegah Adanya Regenerasi Gali, *Bernas*.
- Sgpr, (1983). Operasi Pemberantasan Kejahatan Melegakan, *Kedaulatan Rakyat*, No. 178 Tahun XXXVIII.

Jurnal

- Tim, (2011), Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985. Diakses dari <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=44&id=2639&cid=10003&lang=en> pada hari Senin 24 Juli 2017 pukul 15.01 WIB.

Departemen Penerangan Republik Indonesia, (1981), *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto*, tersedia pada www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9284/1763/ hlm 983. Diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 07.45 wib.

Laksmi Kusuma Wardani, (2012). “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, No. 1 Volume 25. Diakses pada <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/06%20laksmi%20Revisi%20FIX%20PENGGARUH%20PANDANGAN%20SOSIO-KULTURAL%20SULTAN.pdf> pada tanggal 17 Agustus 2017, pukul 17.04 WIB